

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Industri kecil dan menengah di berbagai negara termasuk di Indonesia merupakan salah satu penggerak perekonomian rakyat yang tangguh. Hal ini karena kebanyakan para pengusaha berasal dari kalangan menengah bawah. Selain itu peranan IKM terutama sejak krisis moneter pada tahun 1998 dapat dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi nasional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja IKM dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Terdapat potensi yang besar dalam sektor IKM harus dikelola dan dikembangkan dengan baik. Oleh sebab itu pengusaha kecil dan menengah harus memiliki kebiasaan untuk menyusun laporan keuangan sebagai salah satu cara pengembangan usahanya. Bisnis skala kecil atau menengah (IKM) memiliki peran penting terhadap perkembangan ekonomi, menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup banyak dan memberi kontribusi terhadap pertumbuhan serta peningkatan kesejahteraan. Boleh dikatakan, bisnis skala kecil atau menengah merupakan penyelenggaran ketenagakerjaan. Kepemilikan oleh keluarga menjadi sebuah keuntungan, terutama dalam menyediakan modal yang dibutuhkan dalam bentuk peralatan, kendaraan atau aset lainnya. Modal yang berasal dari keluarga merupakan kombinasi yang unik dari nilai-nilai dalam keluarga, keterampilan sosial, perilaku dan cara menghadapi masalah serta tantangan-tantangan. Akan tetapi bisnis skala kecil yang dimulai dari usaha keluarga bisa jadi lebih beresiko ketimbang bisnis berskala besar dan bukan usaha keluarga. Bisnis berskala kecil lebih riskan terhadap guncangan dan erosi.

Kota Bandung yang dikenal sebagai kota *fashion*, memang memiliki potensi yang cukup besar untuk mengembangkan industri pakaian. Salah satunya adalah pakaian rajutan yang diproduksi oleh para pengrajin industri kecil menengah (IKM) di sentra industri Rajutan Binong Jati Bandung. Sentra Industri

Rajutan Binong Jati Bandung merupakan salah satu industri kecil yang cukup potensial dan dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian di kota Bandung. Pakaian rajutan yang dihasilkan industri tersebut mampu bersaing dengan rajutan yang diproduksi pabrik-pabrik besar. Selain harganya yang relatif murah, model pakaiannya mengikuti selera konsumen, corak pakaian rajutan bervariasi sehingga konsumen menjadi tertarik dan hasil produksi Rajutan Binong Jati Bandung semakin dikenal dan disukai oleh masyarakat. Berikut ini jumlah data pengrajin Industri Binong Jati Bandung dari tahun 2009-2017.

Tabel 1.1 Jumlah Pengrajin Sentra Industri Rajutan Binong Jati Bandung tahun 2009-2017

Tahun	Jumlah Pengrajin
2009	350
2010	380
2011	400
2012	350
2013	300
2014	270
2015	200
2016	120
2017	200

Sumber : Koperasi Industri Rajutan Binong Jati (KIRBI)

Berkurangnya jumlah pengrajin dikarenakan mereka tidak mampu bertahan karena ongkos produksi yang tinggi sehingga tidak mampu bersaing dengan harga produk impor yang murah. Selain itu, mereka ingin menghindari kerugian yang terlalu besar sehingga mereka beralih profesi yang sebelumnya menjadi produsen kini menjadi pedagang.

Berbagai masalah dan kendala yang dihadapi Industri Kecil Menengah (IKM) menyebabkan kinerja kurang berhasil atau gagalnya kegiatan usaha dari industri kecil tersebut. Kinerja adalah merujuk pada tingkat pencapaian atau prestasi dari perusahaan dalam periode waktu tertentu. Masalah dan kendala

tersebut dapat berasal dari faktor eksternal maupun internal Industri Kecil Menengah. Beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan kegagalan industri antara lain pembeli, pemasok, teknologi dan pemerintah. Sedangkan beberapa faktor internal yang dapat menyebabkan kegagalan industri adalah pemasaran.

Saat ini, para pengrajin kesulitan dalam hal memasarkan hasil produksinya. Hal ini dikarenakan beberapa pengrajin masih menggunakan teknik pemasaran yang sama seperti dahulu, sehingga tidak ada perkembangan yang mereka raih dalam aspek ini. Serta sikap tertutup mereka pun menyebabkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan mereka pada aspek pemasaran sehingga mereka belum mampu untuk mencapai target pasarnya dengan cara yang disukai oleh konsumennya. Tenaga kerja yang bekerja pada Sentra Industri ini pun harus kuat merasakan dampaknya. Pesaing yang kuat menyebabkan para pengrajin melakukan *efisiensi*, salah satunya dengan cara mengurangi jumlah tenaga kerja. Kondisi tersebut dapat dilihat dalam tabel 1.2 berikut ini:

Tabel 1.2 Jumlah Tenaga Kerja sentra Industri Rajutan Binong Jati Bandung tahun 2009-2017

Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
2009	7000
2010	7600
2011	8000
2012	6300
2013	4800
2014	4050
2015	2400
2016	1200
2017	2400

Sumber : Koperasi Industri Rajutan Binong Jati (KIRBI)

Dalam menghadapi permasalahan tersebut, pihak koperasi telah melakukan langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut diantaranya dengan mengikuti pelatihan bersama Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Jawa Barat untuk meningkatkan keahlian dan kompetensi pengrajin

serta kerjanya. Namun pelatihan masih dibelum *aplikatif* karena pelatihan tersebut masih bersifat general. Selain itu koperasi juga mengadakan program magang bagi pengrajin muda yang ditempatkan di perusahaan besar dengan tujuan agar peserta mendapatkan pengetahuan tentang proses marketing dan pengelolaan keuangan, sehingga mereka mampu terlihat apa yang terjadi dalam dunia bisnis saat ini. Namun program ini pun masih belum *efektif* karena peserta magang yang kurang antusias dan jumlah peserta yang terus menerus berkurang.

Terselenggaranya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan Kota Bandung adalah sebagai sarana dalam menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan selain sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja LKIP diharapkan dapat bermanfaat dalam rangka mendorong Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian Perdagangan untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi pembangunan secara baik dan benar, yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat.

Komitmen dan perhatian yang besar dari pemerintah sangat diperlukan agar pelaku usaha yang tergabung dalam koperasi dan IKM dapat meningkatkan terus daya saingnya berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang berskala besar. Komitmen ini dapat ditunjukkan dengan rencana yang berkesinambungan dari rencana program jangka menengah yang telah dilaksanakan sebelumnya. Adapun perangkat kebijakan pemerintah pusat yang dapat dijadikan sebagai

landasan bagi fasilitas koperasi dan IKM sebenarnya sudah cukup lengkap dan memadai.

Rendahnya produktivitas koperasi dan IKM selama ini lebih disebabkan oleh lemahnya sumber daya manusia dibidang manajemen, organisasi yang kurang profesional, penguasaan teknologi dan pemasaran yang lemah serta rendahnya kualitas kewirausahaan dari para manajer koperasi dan pelaku usaha IKM. Masalah pengembangan juga bertambah rumit karena kebanyakan koperasi dan IKM kurang difasilitasi dengan akses terhadap permodalan, informasi, pasar, teknologi dan faktor-faktor penunjang bisnis lainnya. Dalam rencana jangka menengah, pihak pemerinath daerah hendaknya bisa memperbarui komitmen terhadap koperasi dan IKM dengan menempatkannya ke dalam dinas khusus yang disertai dengan prioritas pendanaan dan IKM dalam peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah dan masih banyaknya hambatan struktural maupun hambatan manajerial bagi pelaku usaha. Betapapun komitmen harus diwujudkan dalam bentuk tindakan keberpihakan. Yang dimaksud dalam hal ini pemerintah memang harus melindungi koperasi dan IKM yang kebanyakan merupakan kelompok usaha yang masih lemah dan mengalami banyak hambatan untuk bersaing dengan usaha-usaha berskala besar. Tentu saja dinas koperasi dan IKM di daerah juga harus paham kapan saatnya melakukan *exit strategy* apabila koperasi dan IKM sudah dapat berkembang secara mandiri dan tidak tergantung kepada fasilitas pihak pemda.

Masalah budaya merupakan salah satu hal yang *esensial* bagi suatu organisasi karena selalu berhubungan dengan IKM. Budaya organisasi merupakan salah satu alat yang dapat menyatukan hubungan antara pekerja dengan organisasinya karena dengan adanya budaya tersebut akan membuat pekerja merasa dirinya termasuk bagian dari organisasi. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada kinerja para pekerja, karena budaya organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, jadi semakin kuat budaya organisasi, maka semakin tinggi kinerja pekerja. Suatu organisasi juga tidak terlepas dari komitmen organisasional. Komitmen organisasional juga memiliki keterkaitan dengan budaya organisasi. Keharmonisan tujuan yang

tercapai antara pekerja dan organisasi melalui budaya akan membangun suatu komitmen organisasional dalam diri pekerja. Komitmen organisasional juga berhubungan dengan kinerja pekerja dengan adanya komitmen maka kinerja pekerja juga akan meningkat. Kekuatan budaya organisasi dapat diukur dari sejauh mana budaya tersebut dianut oleh semua anggota dan sejauh mana anggota organisasi mempercayainya. Semakin intens budaya organisasi, semakin kuat pengaruhnya pada semua tingkatan dimana budaya memmanifestasikan diri, yaitu mempengaruhi tak sekedar sikap pekerja namun juga nilai-nilai, asumsi dasar dan keyakinan mereka. Budaya organisasi yang kuat merupakan budaya yang menganut berdasarkan nilai inti suatu organisasi. Semakin banyak para anggota organisasi mengakui nilai-nilai inti, maka makin kuat budaya organisasi tersebut. Sebaliknya semakin sedikit para anggota organisasi yang menerima dan melaksanakan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan organisasi, maka semakin lemah budaya suatu organisasi tersebut. Budaya organisasi lemah maka akan menunjukkan semakin rendahnya komitmen atau kinerja para pekerja terhadap suatu organisasi.

Dengan adanya permasalahan yang terjadi di Industri Kecil Menengah (IKM), perlu adanya perhatian lebih dari pihak pemerintah daerah ataupun dari dinas koperasi kota Bandung serta budaya organisasi yang perlu diterapkan di dalam Industri Kecil Menengah (IKM) untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia para pegawai/karyawan dalam memproduksi. Perlu adanya suatu acuan dalam alur untuk meningkatkan pengaruh kebijakan pemerintah dan budaya organisasi untuk mengetahui kompetensi sumber daya manusia pada IKM Sentra Rajutan Binong Jati Bandung. Acuan ini dapat dilakukan dengan pemodelan dengan menggunakan metode *Path Analysis* atau analisis jalur untuk menganalisis pola hubungan variabel untuk mengetahui pengaruh langsung maupun tidak langsung seperangkat variabel bebas terhadap variabel terikat. Sehingga dapat diketahui variabel mana yang berpengaruh pada kompetensi SDM yang ada di IKM Sentra Rajutan Binong Jati Bandung yang akan memberikan nilai tambah pada IKM tersebut.

1.2. Perumusan masalah

Kejelasan dan kelengkapan informasi dari pemerintah dan kebijakan pemerintah yang disajikan berupa laporan tertulis. Hal ini seharusnya bisa di manfaatkan oleh para pelaku IKM agar bisnis yang dijalankan bisa lebih berkembang.

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan bahwa IKM yang ada di Indonesia khususnya di Kota Bandung masih lemah dalam kontribusi untuk meningkatkan kualitasnya, dikarenakan kebijakan pemerintah dan budaya organisasi yang dibuat untuk para pelaku usaha atau IKM kurang dimaksimalkan atau di manfaatkan oleh pelaku usaha itu sendiri maka dari itu dibuatlah rumusan masalah untuk penelitian ini, yaitu diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh kebijakan pemerintah langsung terhadap kompetensi SDM di IKM sentra rajut Binong Jati Bandung?
2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi langsung terhadap kompetensi SDM di IKM sentra rajut Binong Jati Bandung ?
3. Bagaimana pengaruh secara simultan kebijakan pemerintah dan budaya organisasi terhadap kompetensi SDM ?

1.3. Tujuan Pemecahan Masalah

Berdasarkan yang sudah diuraikan di atas, tujuan serta kegunaan penelitian yang dilakukan di Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung kebijakan pemerintah terhadap kompetensi SDM yang ada di IKM sentra rajut Binong Jati Bandung.
2. Untuk mengetahui pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kompetensi SDM di IKM sentra rajut Binong Jati Bandung.
3. Untuk mengetahui pengaruh langsung secara simultan kebijakan pemerintah dan budaya organisasi terhadap kompetensi SDM di IKM sentra rajut Binong Jati Bandung.

1.4. Pembatasan dan Asumsi Masalah

Agar diperoleh pemecahan masalah yang lebih terarah dan penarikan kesimpulan yang lebih akurat, mengingat luasnya bidang penelitian dan keterbatasan kemampuan serta waktu yang tersedia, maka dilakukan pembatasan ruang lingkup penelitian. Adapun pembatasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya dilakukan di IKM sentra rajut Binong Jati Bandung.
2. Kuesioner ini hanya di tujukan pada pemilik IKM sentra rajut Binong Jati Bandung.

1.5. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di IKM rajutan Bandung yang terletak di Jl. Binong Jati No.17, Binong Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat 40275.

1.6. Sistematika Penulisan

Adapun penyusunan laporan tugas akhir dibuat secara sistematis sehingga mudah dipahami dalam penyajiannya. Adapun sistematika pembahasan dibagi menjadi 6 bagian, yaitu :

- **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang keadaan umum yang berisikan Latar Belakang ,Perumusan Masalah ,Tujuan Pemecahan Masalah ,Pembatasan dan Asumsi ,serta Sistematika Penulisan.

- **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustakan yang berisikan hasil penelitian sebelumnya yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas ,serta landasan teori dan model yang digunakan untuk memecahkan masalah.

- **BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH**

Bab ini menjelaskan tentang model pemecahan masalah dan langkah-langkah pemecahan masalah.

- **BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN MASALAH**

Bab ini berisikan penjelasan tentang data dan pengolahan data yang ditunjukkan untuk memecahkan masalah seperti yang telah ditetapkan pada Bab III.

- **BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini menjelaskan berisikan dan interpretasi dari hasil output pemecahan masalah.

- **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran, kesimpulan yang diperoleh dari hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, serta saran yang penulis usulkan yang erat kaitannya dengan kepentingan perusahaan sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan.